



RELASI KUASA TERHADAP KONSTRUKSI PENGETAHUAN DI SEKOLAH PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT DAN REFLEKSI ATAS SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh:

Gede Agus Siswadi

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Email: gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id

Abstract

This research aims to analyse the role of power in the formation of knowledge construction in the educational environment, especially in the Indonesian education system, using Michel Foucault's theoretical perspective. The method used in this research is a qualitative method with a philosophical hermeneutic approach. This research highlights how power plays a key element in the process of knowledge construction in schools. Foucault's concept of power is used to understand how educational institutions, through curriculum, rules, assessment, and institutional structures, influence the formation of knowledge received by students. The analysis in this study also highlights how political power, ideology and cultural values are reflected in the Indonesian education system, shaping certain narratives in curriculum and learning. In addition, this research also shows that power plays a significant role in the construction of knowledge in schools, with strong influence from external factors such as government policies, ideologies and cultural values. The implication is the need for critical reflection on the Indonesian education system, emphasising inclusivity, plurality of perspectives, and meeting the needs of diverse students to enrich knowledge construction in the curriculum and learning process.

Keywords: *Power Relations, Knowledge Construction, Indonesian Education, Michel Foucault.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kuasa dalam pembentukan konstruksi pengetahuan di lingkungan pendidikan, khususnya pada sistem pendidikan Indonesia, dengan menggunakan perspektif teori Michel Foucault. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis. Penelitian ini menyoroti bagaimana kuasa berperan sebagai elemen kunci dalam proses konstruksi pengetahuan di sekolah-sekolah. Konsep kuasa Foucault digunakan untuk memahami bagaimana institusi pendidikan, melalui kurikulum, aturan, penilaian, dan struktur kelembagaan, memengaruhi pembentukan pengetahuan yang diterima oleh siswa. Analisis



dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana kuasa politik, ideologi, dan nilai-nilai budaya tercermin dalam sistem pendidikan Indonesia, membentuk narasi tertentu dalam kurikulum dan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kuasa berperan secara signifikan dalam konstruksi pengetahuan di sekolah, dengan pengaruh yang kuat dari faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, ideologi, dan nilai-nilai budaya. Implikasinya adalah perlunya refleksi kritis terhadap sistem pendidikan Indonesia, dengan menekankan inklusivitas, pluralitas perspektif, dan pemenuhan kebutuhan siswa yang beragam untuk memperkaya konstruksi pengetahuan dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Konstruksi Pengetahuan, Pendidikan Indonesia, Michel Foucault.

I. Pendahuluan

Pendidikan, dalam esensinya, bukan sekadar proses transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan mewakili sebuah panggung peradaban yang menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai investasi peradaban yang merupakan fondasi utama dalam membentuk jati diri dan kemajuan suatu masyarakat (Siswadi, 2023b). Bahkan sejak zaman kuno, manusia telah menyadari pentingnya pendidikan dalam membentuk arah dan identitas peradaban. Dari Akademi Plato hingga universitas modern, pendidikan telah menjadi tonggak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan suatu masyarakat untuk berfungsi secara harmonis. Pada era kontemporer, pendidikan menjadi semakin dianggap sebagai investasi strategis dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Negara-negara memfokuskan sumber daya pada sistem pendidikannya, memperlengkapi individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi global yang terus berkembang.

Pendidikan, dalam banyak hal, bukan hanya tentang transmisi pengetahuan semata, tetapi juga sebuah panggung di mana kekuasaan berinteraksi dengan konstruksi pengetahuan (Siswadi, 2023a). Michel Foucault, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan karyanya dalam analisis kekuasaan dan pengetahuan, mengajukan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan berperan dalam membentuk realitas sosial, termasuk dalam konteks pendidikan. Foucault menolak pandangan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang netral, tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Sebaliknya, Foucault mengungkap bagaimana pengetahuan tidak hanya diproduksi, tetapi juga diatur oleh kekuasaan. Dalam pandangannya, kekuasaan tidak bersifat statis atau terlokalisasi, melainkan terintegrasi dalam relasi sosial, termasuk institusi pendidikan (Olssen, 1999).

Bagi Foucault, institusi pendidikan tidak hanya tempat di mana pengetahuan disampaikan, tetapi juga arena di mana kekuasaan beroperasi untuk mempengaruhi individu dan masyarakat secara lebih luas (Deacon, 2006). Konsep



panoptikon, yang diperkenalkan Foucault, membawa gagasan bahwa pengawasan yang terus-menerus dalam institusi pendidikan menciptakan kontrol internal yang memengaruhi pola perilaku dan pemikiran. Pendidikan, menurut Foucault, bukan hanya tentang pengetahuan yang diterima, tetapi juga proses pembentukan subjek yang terlibat dalam relasi kekuasaan. Institusi pendidikan, dengan norma-norma, aturan, dan struktur hierarkisnya, tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk membuat dan memvalidasi pengetahuan (Deacon, 2000).

Sekolah, sering dianggap sebagai tempat di mana pengetahuan disampaikan secara objektif, sebenarnya juga merupakan panggung bagi dinamika kuasa yang kompleks dalam pembentukan dan penyebaran pengetahuan (Deacon, 2002). Michel Foucault, seorang filsuf yang menelusuri peran kuasa dalam institusi sosial, mengungkap bagaimana kuasa tidak hanya mempengaruhi pembentukan pengetahuan, tetapi juga mengontrol representasi tentang apa yang dianggap benar atau salah (Ball S (ed.), 1990). Di dalam lingkungan sekolah, kuasa hadir dalam berbagai bentuk. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang dipilih, cara pengajaran yang diadopsi, serta dalam penentuan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran. Proses seleksi dan penafsiran pengetahuan sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada, yang mungkin mempertahankan narasi yang menguntungkan kepentingan tertentu. Foucault menyoroti bahwa pengaruh kuasa dalam konstruksi pengetahuan di sekolah menciptakan relasi yang kompleks antara para pemilik otoritas dalam mendefinisikan apa yang dianggap sah dan yang tidak (Jardine, 2005). Ini juga menciptakan mekanisme kontrol dan pengawasan, yang memengaruhi bagaimana siswa memahami, menerima, dan mereproduksi pengetahuan yang diajarkan. Oleh karenanya, penelitian ini sangat penting untuk mengungkap relasi kuasa terhadap konstruksi pengetahuan di sekolah dengan menggunakan pemikiran dari Michel Foucault serta bagaimana refleksi dari pandangan-pandangan Michel Foucault tentang pendidikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari karya-karya ataupun literatur primer dari tokoh Michel Foucault. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti dalam artikel, buku, ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis dari Miles dan Huberman yakni dari data koleksi, kemudian reduksi data, selanjutnya *display data* dan terakhir adalah penyimpulan data. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan refleksi terhadap sistem pendidikan di Indonesia.



III. Pembahasan

3.1 Biografi Michel Foucault dan Pokok-Pokok Pemikirannya

Michel Foucault, lahir pada 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis, adalah seorang filsuf, sejarawan, dan sosiolog yang terkenal dengan kontribusinya pada pemahaman kita tentang kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sosial. Orang tua Foucault adalah Paul Foucault (ayahnya) seorang ahli bedah dan Anne Malapert (ibunya). Ayahnya adalah seorang tokoh penting dalam kehidupan Foucault karena ayahnya tersebut mempengaruhi minat Foucault pada kedokteran dan ilmu pengetahuan. Pada masa kecilnya, Foucault digambarkan sebagai anak yang cerdas dan sering menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku di perpustakaan keluarganya. Foucault menunjukkan ketertarikan awal pada sastra dan filosofi, yang kemudian membentuk fondasi bagi minatnya pada studi humaniora (Gutting, 2005).

Foucault mendapatkan pendidikan di Sekolah Jesuit di Poitiers sebelum melanjutkan studinya di École Normale Supérieure di Paris pada tahun 1946. Foucault mempelajari filsafat dan psikologi, dan kemudian belajar dari tokoh-tokoh terkenal seperti Maurice Merleau-Ponty dan Louis Althusser. Pendidikannya membentuk fondasi pemikiran Foucault dalam menganalisis struktur kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat. Setelah lulus, Foucault mengejar karir akademis yang cemerlang di berbagai universitas di Prancis dan luar negeri. Foucault kemudian menjadi profesor di beberapa universitas terkemuka, termasuk Universitas Clermont-Ferrand, Universitas Tunis, serta kemudian Universitas Vincennes di Paris. Foucault juga melakukan penelitian yang mendalam, yang menghasilkan karya-karya pentingnya seperti *“Madness and Civilization”* (1961), *“The Birth of the Clinic”* (1963), *“Discipline and Punish”* (1975), dan *“The History of Sexuality”* (1976) (Jardine, 2005).

Kehidupan dan pendidikan awal Foucault merupakan faktor penting dalam membentuk pendekatan analitis dan kritisnya terhadap institusi sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika pengetahuan yang Foucault terapkan dalam karya-karyanya. Pada tahun 1984, Michel Foucault meninggal dunia di Paris, tetapi warisannya dalam pemikiran kritis terhadap masyarakat terus memengaruhi berbagai disiplin ilmu hingga saat ini. Pengaruh Nietzsche dalam pemikiran Foucault tak terbantahkan. Konsep Nietzsche tentang kekuasaan sebagai sebuah dinamika yang melintasi semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam cara kekuasaan memengaruhi konstruksi pengetahuan dan kebenaran, membentuk dasar bagi pemikiran Foucault tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Pemikiran Nietzsche tentang *“genealogy”* dan pandangan kritisnya terhadap sejarah dan nilai-nilai moral mempengaruhi Foucault dalam melakukan analisis kritis terhadap institusi dan norma-norma sosial.

Selanjutnya yang mempengaruhi pemikiran Michel Foucault adalah Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, sebagai mentornya di École Normale Supérieure, memperkenalkan Foucault pada konsep fenomenologi dan pengalaman tubuh. Pengaruh ini terlihat dalam pemikiran Foucault tentang subjektivitas dan bagaimana individu membentuk identitasnya melalui interaksi



dengan dunia di sekitarnya, yang menjadi fokus dalam karya-karya Foucault tentang kekuasaan dan kontrol sosial (Gutting, 2005). Berikutnya adalah Emmanuel Levinas. Meskipun pengaruhnya tidak langsung, pemikiran Levinas tentang etika, tanggung jawab kepada yang lain, dan konstruksi identitas subjek juga mempengaruhi pemikiran Foucault. Konsep-konsep etika dan hubungan antara individu dan masyarakat dalam karya Levinas memberikan landasan untuk pemikiran Foucault tentang kekuasaan dan konstruksi subjektivitas.

Pengaruh Freud dalam psikoanalisis dan konsep tentang bagaimana kekuatan tak sadar mempengaruhi perilaku individu memberikan wawasan penting bagi Foucault. Terutama, konsep tentang pembentukan identitas individu dan kontrol sosial dalam karya Foucault sering kali merujuk pada konsep psikoanalisis Freud. Selanjutnya Foucault juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Georges Canguilhem. Canguilhem merupakan seorang epistemolog Prancis, mempengaruhi pemikiran Foucault dalam memahami bagaimana pengetahuan dikonstruksi dalam masyarakat. Kontribusinya dalam konsep tentang apa yang dianggap sebagai “normal” dalam masyarakat berdampak pada karya-karya Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan.

Berikutnya adalah Max Weber. Pemikiran Weber tentang rasionalitas, birokrasi, dan konsep kekuasaan membentuk landasan bagi Foucault dalam memahami struktur kekuasaan modern. Konsep Weber tentang bagaimana kekuasaan terorganisir dan dijalankan dalam institusi sosial memengaruhi pandangan Foucault tentang hubungan antara kekuasaan, struktur sosial, dan individu. Selanjutnya Foucault juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Louis Althusser. Althusser, seorang filsuf Marxis, berpengaruh terutama dalam memahami struktur kekuasaan dan ideologi dalam pemikiran Foucault. Kontribusi Althusser tentang bagaimana ideologi memainkan peran penting dalam pembentukan subjek dan struktur kekuasaan membantu membentuk analisis Foucault tentang kekuasaan (Gutting, 2005).

Selanjutnya Foucault juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Pierre Hadot. Hadot adalah seorang sejarawan filsafat yang memperkenalkan Foucault pada pemikiran Yunani Kuno, khususnya mengenai praktek spiritualitas dan etika diri. Pengaruh Hadot terlihat dalam pemikiran Foucault tentang praktik-praktik subjektivitas dan bagaimana individu membentuk dirinya sendiri dalam konteks sosial. Berikutnya adalah Michel Serres. Serres memberikan kontribusi pada Foucault melalui karya-karyanya tentang epistemologi dan hubungan antara ilmu pengetahuan dan struktur sosial. Pemikiran Serres membantu Foucault dalam memahami peran pengetahuan dalam pembentukan kekuasaan dan bagaimana ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh struktur sosial. Kemudian Foucault juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Karl Marx. Pengaruh Marx dalam pemikiran Foucault, meskipun tidak utuh, terkait dengan konsep-konsep struktur kelas, konflik sosial, dan analisis kekuasaan. Meskipun Foucault tidak sepenuhnya mengikuti pendekatan Marx, namun kontribusi Marx pada konteks pemikiran kritis terhadap kekuasaan dan struktur sosial memberikan sumbangsih penting bagi kajian Foucault (Gutting, 2005).



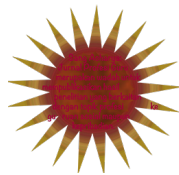
Foucault pada masa hidupnya banyak melahirkan karya-karya yang cukup berpengaruh pada dunia filsafat, sosial, dan juga politik. Karya-karya dari Foucault di antaranya: *Madness and Civilization* (1961). Karya ini mengulas evolusi persepsi terhadap kegilaan dari abad pertengahan hingga modernitas. Foucault memaparkan bagaimana masyarakat Barat memandang orang-orang gila, dari dipersekusi dan dipenjarakan hingga diisolasi dalam institusi-institusi seperti rumah sakit jiwa. Foucault menggambarkan bagaimana konsep kegilaan berubah seiring pergeseran budaya dan kekuasaan (Foucault, 1988). Karya selanjutnya adalah *The Birth of the Clinic* (1963). Karya ini memeriksa transformasi dalam praktek medis, terutama fokus pada awal munculnya rumah sakit modern. Foucault menggambarkan bagaimana pandangan tentang penyakit dan pengobatan telah berkembang seiring waktu, serta bagaimana pengetahuan medis dan kekuasaan memainkan peran penting dalam konstruksi institusi medis (Gutting, 2005).

Selanjutnya, karya yang penting dari Foucault dengan judul *The Order of Things* (1966). Karya ini merupakan eksplorasi mendalam tentang sejarah epistemologi. Foucault membahas perubahan dalam cara manusia memahami dan mengkategorikan pengetahuan dari abad Renaisans hingga modernitas. Foucault memperkenalkan gagasan tentang *episteme* yang merujuk pada kategori pengetahuan dan pemahaman yang mendominasi suatu periode tertentu (Foucault, 2005). Berikutnya adalah karya dengan judul *Discipline and Punish* (1975). Karya ini menganalisis evolusi sistem kekuasaan, terutama fokus pada sistem penjara. Foucault menggambarkan bagaimana kontrol sosial melalui disiplin dan pengawasan berkembang dari hukuman fisik publik menjadi sistem pengawasan yang lebih terinci dan internal, yang memengaruhi cara pandang terhadap kekuasaan dan disiplin dalam masyarakat modern (Ball S (ed.), 1990).

Kemudian karya penting dari Foucault berikutnya adalah *The History of Sexuality* (1976-1984). Karya ini mengeksplorasi konstruksi sosial terkait seksualitas. Foucault menyoroti bagaimana pengetahuan tentang seksualitas dipengaruhi oleh kekuasaan dan bagaimana masyarakat mengatur dan mengontrol tubuh serta perilaku seksual (Foucault, 2000). Karya-karya Foucault menghadirkan analisis mendalam tentang bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas saling terkait dan terbentuk dalam sejarah budaya. Foucault menekankan bahwa institusi dan pengetahuan bukanlah entitas tetap, tetapi terbentuk dan berubah sepanjang sejarah, membentuk cara manusia untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

3.2 Relasi Kuasa terhadap Konstruksi Pengetahuan di Sekolah dalam Pandangan Michel Foucault

Pada konteks pendidikan, pandangan Foucault tentang wacana kuasa menyoroti bagaimana kekuasaan terwujud dan terdistribusi dalam institusi pendidikan. Foucault menganggap pendidikan sebagai salah satu lokus utama di mana kekuasaan dijalankan, bukan hanya dalam bentuk aturan formal dan struktural, tetapi juga melalui praktik-praktik kecil sehari-hari. Foucault



menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang transfer pengetahuan yang netral, tetapi juga merupakan proses di mana kekuasaan diterapkan dan diperkuat. Institusi pendidikan menjadi lokus bagi produksi pengetahuan dan kontrol sosial. Guru bukan hanya sebagai pembawa informasi, tetapi juga sebagai agen kekuasaan yang memengaruhi cara berpikir, perilaku, dan pengetahuan siswa (Ball, 2017).

Konsep “birokrasi pengetahuan” Foucault berlaku dalam konteks pendidikan di mana kurikulum, buku teks, dan bahkan cara mengajar merupakan instrumen kekuasaan yang membentuk pengetahuan. Pemilihan materi apa yang diajarkan, bagaimana itu diajarkan, serta bahasa yang digunakan dalam konteks pendidikan semuanya merupakan bagian dari wacana kuasa yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Foucault juga menyoroti kekuatan institusi dalam menormakan dan mendisiplinkan individu. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga norma-norma sosial, baik dalam hal perilaku, pengetahuan, maupun identitas. Ini menciptakan tatanan sosial yang diikuti oleh siswa dan memberikan legitimasi terhadap otoritas guru dan institusi pendidikan (Ilham, 2020).

Birokrasi pengetahuan dalam pendidikan, menurut pandangan Michel Foucault, adalah konsep yang menyoroti bagaimana pengetahuan diproduksi, dikendalikan, dan disebarkan dalam institusi pendidikan sebagai alat untuk menjaga dan menegakkan kekuasaan. Pertama-tama, Foucault menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, tetapi dihasilkan dan diperkuat melalui praktik-praktik kekuasaan (Baker & Heyning, 2004). Ini berarti bahwa kurikulum, materi ajar, dan cara pengajaran merupakan instrumen kekuasaan yang membentuk pemahaman siswa terhadap dunia. Kurikulum yang dipilih oleh lembaga pendidikan tidak hanya mencerminkan pengetahuan yang “objektif”, tetapi juga merupakan hasil dari kekuatan politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi struktur kekuasaan. Foucault menyoroti bahwa materi ajar yang diberikan dalam pendidikan dipilih dengan tujuan tertentu, memunculkan versi tertentu tentang realitas yang diinginkan oleh penguasa atau kelompok yang berkuasa (Walshaw, 2007).

Lebih jauh lagi, cara pengajaran dan pembelajaran juga merupakan bagian dari birokrasi pengetahuan. Gaya pengajaran guru, tata cara evaluasi, dan norma-norma yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan semuanya merupakan alat-alat kekuasaan yang memengaruhi pembentukan pengetahuan siswa (Olssen, 1999). Foucault menunjukkan bahwa ini tidak hanya menghasilkan pemahaman tertentu, tetapi juga mengontrol cara individu memahami dan merespons dunia di sekitarnya. Birokrasi pengetahuan dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada apa yang diajarkan, tetapi juga pada apa yang diabaikan atau dihilangkan dari kurikulum. Foucault menyoroti bahwa pemilihan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang penting dan apa yang diabaikan merupakan bentuk kekuasaan yang sering kali tidak disadari (Deacon, 2005).

Selain itu, Foucault menekankan bahwa lewat birokrasi pengetahuan, lembaga pendidikan dapat menghasilkan hegemoni, yaitu dominasi ideologi



tertentu yang mendukung struktur kekuasaan yang ada. Ideologi-ideologi yang didorong oleh penguasa atau kelompok berkuasa dapat diukuhkan melalui pengetahuan yang disebarkan dalam lingkungan pendidikan (Bushnell, 1996). Namun demikian, Foucault juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang birokrasi pengetahuan dalam pendidikan dapat membuka ruang bagi kritisisme terhadap struktur kekuasaan yang ada. Dengan menyadari peran kekuasaan dalam produksi pengetahuan, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih kritis dan mempertanyakan kebenaran yang diwakili oleh institusi pendidikan. Ini mengundang pemikiran bahwa perubahan dalam paradigma pendidikan dapat membuka ruang bagi inklusivitas, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap keragaman dalam pengetahuan dan pemikiran.

Selanjutnya, di dalam pendidikan juga tidak luput dari disiplin dan juga pengawasan. Disiplin dan pengawasan dalam pendidikan, menurut pandangan Michel Foucault, merupakan strategi-strategi kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan untuk menjaga dan menegakkan kontrol terhadap individu (Deacon, 2002). Pertama-tama, Foucault menekankan bahwa sistem disiplin yang ada dalam pendidikan adalah bagian dari teknologi kekuasaan yang memengaruhi perilaku dan tindakan siswa. Aturan sekolah, jam pelajaran, tata tertib, serta struktur hierarkis di dalam lingkungan pendidikan merupakan cara-cara untuk menormakan dan mendisiplinkan individu agar sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan.

Foucault menggambarkan bahwa pengawasan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem disiplin. Pengawasan bukan hanya dilakukan oleh guru atau staf pendidikan, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan kolektif, seperti teman sebaya atau struktur hierarkis di antara siswa (Blades, 1997). Pengawasan ini menciptakan tatanan sosial yang mengontrol dan mengarahkan perilaku individu sesuai dengan harapan lembaga pendidikan. Konsep pengawasan dan disiplin Foucault juga melibatkan pembentukan identitas melalui norma-norma sosial yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Siswa diajak untuk menginternalisasi norma-norma tersebut, sehingga siswa menjadi bagian dari identitas dan perilaku yang diterima dalam masyarakat.

Pentingnya disiplin dan pengawasan dalam pendidikan, menurut Foucault, adalah dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Lembaga pendidikan menjadi alat untuk melatih individu agar tunduk pada aturan-aturan yang ada dalam masyarakat (Ball S (ed.), 1990). Hal ini memperkuat kontrol sosial yang diperlukan oleh pemerintah atau otoritas untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Namun, Foucault juga menunjukkan bahwa sistem disiplin dan pengawasan dalam pendidikan memiliki dampak yang kompleks. Meskipun membentuk struktur sosial yang diinginkan, sistem ini juga dapat menghambat kemampuan individu untuk mengembangkan potensi kreatif, kritis, dan otonomi. Hal ini dikarenakan penekanan pada ketaatan dan konformitas dapat mengurangi ruang bagi eksplorasi ide-ide baru dan pembangunan pemikiran kritis.

Kritik Foucault terhadap disiplin dan pengawasan dalam pendidikan menyoroti bahwa pendekatan ini seringkali mengabaikan keberagaman dan



keunikan individu. Hal ini dapat mengakibatkan homogenisasi dan penindasan terhadap kebebasan berpikir serta berperilaku secara individual. Pemahaman Foucault tentang disiplin dan pengawasan dalam pendidikan memunculkan pentingnya refleksi kritis terhadap dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik-praktik pendidikan. Dengan memahami hal ini, maka seharusnya penanggungjawab dalam pendidikan akan dapat berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, mendukung kreativitas, serta memberikan ruang bagi kebebasan berpikir dan berekspresi bagi individu.

Selanjutnya, Foucault juga memandang bahwasanya normalisasi identitas dalam pendidikan juga sangat sering terbentuk tanpa di sadari. Normalisasi identitas dalam pandangan Michel Foucault, mengacu pada proses di mana lembaga pendidikan berperan dalam membentuk dan menormalkan identitas individu agar sesuai dengan standar atau norma-norma yang diinginkan oleh masyarakat atau kekuasaan yang ada (Jardine, 2005). Foucault menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan alat untuk memproduksi dan menjaga identitas yang cocok dengan citra yang diharapkan oleh struktur kekuasaan. Proses normalisasi identitas dalam pendidikan melibatkan pembentukan norma-norma yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “normal” dalam masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma perilaku, pengetahuan, dan kategori-kategori identitas seperti gender, kelas sosial, ras, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan berperan penting dalam memperkuat norma-norma ini melalui kurikulum, interaksi guru dengan siswa, dan lingkungan sosialnya.

Foucault menyoroti bahwa normalisasi identitas dalam pendidikan seringkali menghasilkan homogenisasi, di mana individu diposisikan agar sesuai dengan citra atau ideal tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Proses ini menyiratkan penghapusan atau penindasan terhadap perbedaan individu, yang dapat membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan identitasnya yang sebenarnya. Melalui pendidikan, identitas yang dihasilkan seringkali menjadi bagian dari strategi kekuasaan. Identitas yang diterapkan secara normatif memungkinkan penguasa atau kelompok berkuasa untuk mempertahankan kontrol terhadap struktur sosial yang ada. Hal ini menciptakan kontrol yang kuat terhadap individu dalam masyarakat (Ball, 2017).

Namun, Foucault juga menyoroti bahwa normalisasi identitas dalam pendidikan bukanlah proses yang statis. Identitas yang dihasilkan dapat berubah sesuai dengan perubahan norma-norma dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses normalisasi identitas dapat menjadi objek perjuangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Salah satu kritik Foucault terhadap normalisasi identitas dalam pendidikan adalah bahwa hal itu dapat menghasilkan marginalisasi atau penindasan terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Hal ini menyiratkan bahwa individu atau kelompok yang berbeda sering kali dianggap sebagai abnormal atau di luar norma. Dalam melihat normalisasi identitas dalam pendidikan, penting untuk menyadari bahwa identitas bukanlah sesuatu yang baku



atau statis, melainkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan kebudayaan. Foucault menegaskan perlunya kesadaran kritis terhadap dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik proses normalisasi identitas dalam pendidikan, serta mendorong untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, menghargai keberagaman identitas, dan memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan identitasnya secara bebas.

Selanjutnya, Foucault juga menyoroti tentang hierarki pengetahuan dalam pendidikan. Menurut Michel Foucault, hierarki pengetahuan dalam pendidikan merujuk pada struktur yang memposisikan jenis-jenis pengetahuan atau disiplin ilmu dalam tingkatan yang berbeda. Foucault menyoroti bahwa tidak semua pengetahuan dianggap sama pentingnya atau memiliki otoritas yang setara dalam lingkungan pendidikan (Foucault, 2002). Terdapat hierarki yang mempengaruhi distribusi pengetahuan dan kekuasaan di dalam lembaga pendidikan. Otoritas guru dalam hierarki pengetahuan adalah representasi dari kekuasaan dan otoritas dalam proses pendidikan. Foucault menekankan bahwa guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai agen kekuasaan yang memengaruhi pemahaman siswa tentang dunia. Otoritas guru memposisikan dirinya sebagai penentu yang memiliki wewenang dalam memilih dan menyampaikan pengetahuan kepada siswa.

Hierarki pengetahuan menciptakan struktur yang menetapkan disiplin ilmu yang dianggap lebih superior atau lebih berkuasa daripada yang lain. Misalnya, ilmu sosial mungkin dianggap lebih rendah posisinya daripada ilmu alam dalam suatu konteks pendidikan (Siswadi, 2023b). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pengetahuan yang dapat memengaruhi cara siswa memahami dunia. Otoritas guru dalam hierarki pengetahuan memberikan kekuatan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah atau tidak sah. Guru memiliki peran kunci dalam menentukan kurikulum, menilai pengetahuan yang diterima siswa, dan memengaruhi cara siswa memandang dunia.

Namun demikian, Foucault menunjukkan bahwa hierarki pengetahuan dan otoritas guru bukanlah sesuatu yang statis atau netral. Hierarki pengetahuan cenderung menciptakan otoritas yang dapat mempengaruhi identifikasi, produksi, dan validasi pengetahuan tertentu. Guru, sebagai agen kekuasaan, memiliki peran krusial dalam memelihara hierarki pengetahuan yang ada. Salah satu kritik Foucault terhadap hierarki pengetahuan adalah bahwa struktur ini sering kali menindas atau mengabaikan pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan kearifan lokal, serta memposisikan pengetahuan tertentu sebagai superior tanpa mempertimbangkan keragaman pengetahuan yang ada. Foucault mengajak untuk refleksi kritis terhadap hierarki pengetahuan dan peran otoritas guru dalam pendidikan. Hal ini menyoroti perlunya pengakuan terhadap keragaman pengetahuan serta pemahaman bahwa otoritas guru harus digunakan dengan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, mendukung, dan menghormati berbagai macam sumber pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan kritis tentang dunia.



Selanjutnya, Foucault juga melihat di dalam pendidikan terdapat penguatan hegemoni. Menurut pandangan Michel Foucault, hal merujuk pada proses di mana lembaga pendidikan menjadi alat untuk mempertahankan dominasi ideologi atau kebijakan tertentu yang mendukung struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat (Tamboukou, 2003). Pertama-tama, Foucault menyoroti bahwa pendidikan bukan hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena di mana ideologi dan nilai-nilai tertentu ditanamkan dalam pikiran siswa. Hegemoni dalam pendidikan menciptakan narasi-narasi yang mendukung ideologi dominan atau kepentingan kelompok yang berkuasa. Kurikulum, buku teks, dan cara pengajaran dipilih untuk memperkuat ideologi tertentu, seringkali mengabaikan atau menghapus alternatif atau sudut pandang yang berbeda.

Foucault menekankan bahwa pendidikan menjadi sarana yang digunakan untuk memperkuat hegemoni dengan mengontrol produksi dan distribusi pengetahuan. Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam melestarikan kekuatan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dengan menekankan nilai-nilai yang mendukung struktur kekuasaan yang ada. Proses penguatan hegemoni dalam pendidikan sering kali berdampak pada homogenisasi pengetahuan dan pemikiran. Pemilihan materi ajar, sudut pandang yang diberikan, serta cara evaluasi sering kali didesain untuk menguatkan ideologi yang mendominasi dan mengabaikan keberagaman pandangan.

Hegemoni dalam pendidikan juga memungkinkan reproduksi dan penguatan struktur sosial yang ada. Dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung kekuasaan yang ada, lembaga pendidikan membantu dalam mempertahankan struktur hierarkis dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun, Foucault juga menyoroti bahwa hegemoni bukanlah sesuatu yang pasti atau tak tergoyahkan. Lembaga pendidikan tidaklah menguasai secara totalitas, dan terdapat ruang untuk resistensi dan perlawanan terhadap ideologi yang dominan. Pendekatan Foucault terhadap penguatan hegemoni dalam pendidikan mengajak untuk refleksi kritis terhadap praktik-praktik pendidikan yang mendukung ideologi tertentu. Hal ini menekankan perlunya pendidikan yang lebih inklusif, mendukung keberagaman pandangan, dan memberikan ruang bagi siswa untuk mempertanyakan dan mengkritisi ideologi yang diberikan.

3.3 Refleksi Pemikiran Michel Foucault terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia

Relevansi pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan membuka jendela untuk mengulas sistem pendidikan Indonesia. Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya muncul dalam struktur politik, tetapi juga melalui pengetahuan yang diperoleh dan disebarkan dalam masyarakat (Deacon, 2002). Di Indonesia, sistem pendidikan tercermin dalam pengontrolan atas pengetahuan yang disampaikan kepada siswa. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah menjadi instrumen utama yang mencerminkan dominasi kekuasaan. Pilihan pengetahuan yang diakui dalam kurikulum seringkali mencerminkan



agenda politik, tanpa selalu mempertimbangkan kebutuhan lokal atau keberagaman budaya yang kaya di Indonesia (Cahyani, 2017). Dalam konteks kekuasaan dan pengetahuan, sistem pendidikan Indonesia juga menegakkan hierarki yang kuat. Institusi-institusi pendidikan seringkali menjadi tempat di mana kekuasaan direproduksi, dengan guru dan staf administratif mendominasi arus pengetahuan dan pengendalian terhadap siswa. Penekanan pada otoritas ini sejalan dengan pemikiran Foucault tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui struktur hierarkis untuk mengendalikan individu. Namun, hal ini juga dapat membatasi kreativitas dan kebebasan berpikir siswa, karena siswa terikat pada norma-norma yang diberlakukan.

Foucault menyoroti bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam proses normalisasi dan disiplinasi individu dalam masyarakat (Gutting, 2005). Di Indonesia, pendidikan sering kali bertujuan untuk menormalkan perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan ide bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu agar sesuai dengan norma-norma yang diinginkan oleh pihak berkuasa. Sistem pendidikan Indonesia juga menunjukkan pengawasan terhadap jenis pengetahuan yang diizinkan dan dilarang disebarkan. Konsep Foucault tentang pengawasan dalam mempertahankan kekuasaan terlihat dalam upaya kontrol terhadap narasi atau ideologi tertentu yang dapat disampaikan dalam lingkungan pendidikan. Hal ini mempengaruhi ruang bagi siswa dan pendidik untuk mempertanyakan atau mengeksplorasi gagasan-gagasan alternatif di luar kerangka yang ditetapkan.

Selain itu Michel Foucault menyoroti tentang hubungan antara kekuasaan dan hierarki dalam institusi-institusi sosial, termasuk sistem pendidikan. Dalam pemikirannya, Foucault menyoroti bahwa kekuasaan bukanlah hanya kontrol langsung oleh pemerintah atau lembaga-lembaga, tetapi juga terwujud melalui struktur hierarkis yang ada dalam masyarakat (Olssen, 1999). Di Indonesia, sistem pendidikan mencerminkan hierarki yang kuat, dengan otoritas seperti guru, kepala sekolah, dan staf administratif memiliki peran dominan dalam mempertahankan struktur kekuasaan. Foucault menunjukkan bahwa institusi pendidikan berperan dalam menghasilkan dan mempertahankan hierarki. Sistem pendidikan Indonesia mengonfirmasi hal ini dengan menekankan pentingnya otoritas guru dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Guru dianggap sebagai pembawa pengetahuan yang harus dipatuhi oleh siswa, menciptakan relasi hierarkis di mana pengetahuan dianggap sebagai wewenang tertentu yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Namun, hal ini juga membatasi ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sistem yang sangat hierarkis ini mempersempit kemampuan siswa untuk mempertanyakan, berpikir kritis, atau bahkan mengeksplorasi pengetahuan di luar batas yang ditetapkan oleh otoritas. Hal ini seringkali melahirkan kesenjangan antara pengetahuan yang diajarkan di sekolah dengan realitas lokal atau budaya yang dialami di luar lingkungan pendidikan formal.



Apabila diperhatikan pendidikan Indonesia, peran guru dan kepala sekolah memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah pendidikan (Ilham, 2020). Kekuasaan tersebut diejawantahkan dalam menetapkan kurikulum, mengevaluasi siswa, dan mengatur kegiatan sekolah mengukuhkan struktur hierarki yang eksklusif. Meskipun terdapat upaya untuk memberdayakan siswa dalam beberapa aspek, struktur hierarkis ini masih membatasi keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan atau perubahan dalam sistem pendidikan. Konsep hierarki dalam pemikiran Foucault juga menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya berada dalam struktur formal, tetapi juga tersusun dalam relasi sosial yang kompleks. Di Indonesia, hierarki tidak hanya tercermin dalam struktur formal sekolah, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial yang memberikan bobot pada otoritas dan status tertentu. Hal ini dapat memperkuat hierarki di lingkungan pendidikan, mengukuhkan posisi yang sudah ada dan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya perubahan yang demokratis dan inklusif.

Michel Foucault menyoroti bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap pengetahuan memainkan peran kunci dalam menjaga kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan Indonesia, konsep ini dapat diamati melalui kontrol atas jenis pengetahuan yang diakui dan diizinkan untuk disampaikan di lingkungan pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan standar-standar nasional menjadi instrumen utama yang mencerminkan dominasi kekuasaan dalam menentukan jenis pengetahuan yang dianggap sah. Pemilihan pengetahuan yang diakui dalam kurikulum seringkali tercermin dari agenda politik atau ideologi tertentu, tanpa selalu mempertimbangkan kebutuhan lokal atau keberagaman budaya di Indonesia. Foucault menyoroti bahwa kekuasaan bukan hanya berada dalam struktur politik tetapi juga dalam proses pembentukan pengetahuan yang diperbolehkan dan dikekang dalam masyarakat.

Pada konteks pendidikan di Indonesia, pengawasan ini dapat terlihat dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan isi buku teks, materi pelajaran, atau bahkan gagasan-gagasan tertentu yang diizinkan dalam lingkungan pendidikan. Kontrol ini seringkali membatasi ruang bagi siswa dan pendidik untuk mengeksplorasi atau mempertanyakan ideologi yang ada, mengurangi kebebasan dalam memperoleh wawasan yang lebih luas dan kritis. Pendekatan pengendalian terhadap pengetahuan juga tercermin dalam evaluasi standar nasional dan ujian yang diatur pemerintah. Sistem evaluasi ini cenderung memaksa siswa untuk memahami materi dengan cara tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan, meninggalkan sedikit ruang bagi variasi individual atau pemikiran kritis. Hal ini sesuai dengan pemikiran Foucault tentang bagaimana sistem pengawasan membatasi dan membentuk cara pandang dan pengetahuan yang diperbolehkan.

Pengendalian terhadap pengetahuan di lingkungan pendidikan juga mempengaruhi pembentukan identitas siswa dan membatasi pengalamannya. Siswa seringkali terbatas dalam merangkul pengetahuan di luar kurikulum yang ditetapkan, yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa tentang dunia di sekitarnya dan mendorong terjadinya homogenisasi pengetahuan yang diperoleh. Meskipun keberadaan kontrol terhadap pengetahuan dalam sistem pendidikan



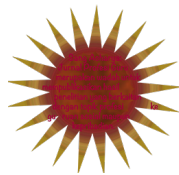
Indonesia memungkinkan adanya stabilitas dalam pembelajaran, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal kebebasan berpikir, kreativitas, dan pemahaman yang lebih luas terhadap realitas sosial. Dalam memahami implikasi pemikiran Foucault, penting untuk mengkritisi pengawasan terhadap pengetahuan di dalam sistem pendidikan, mendukung terbukanya ruang untuk pemikiran kritis, keberagaman ide, dan inklusivitas dalam pendidikan di Indonesia.

IV. Simpulan

Foucault menekankan bahwa kuasa tidak hanya diterapkan oleh pemerintah atau tokoh otoritatif, tetapi juga terwujud dalam struktur sosial seperti sekolah. Di sini, kurikulum, aturan, evaluasi, dan penilaian merupakan alat-alat kuasa yang digunakan untuk membentuk pengetahuan yang diterima oleh siswa. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kuasa politik, ideologi, dan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam kurikulum nasional. Kuasa dalam pendidikan Indonesia dapat dilihat dari pengaruh pemerintah dalam menentukan kurikulum, standar penilaian, serta pengelolaan institusi pendidikan. Hal ini dapat menciptakan narasi tertentu, menekankan nilai-nilai yang dianggap penting oleh pemerintah atau kelompok tertentu, sementara mengabaikan sudut pandang alternatif atau pluralitas dalam konstruksi pengetahuan. Oleh karena itu, refleksi atas sistem pendidikan di Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana kuasa berperan dalam membentuk pengetahuan dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Selain itu keberagaman perspektif, pengalaman, dan kebutuhan siswa serta mendorong kritisisme terhadap pengetahuan yang disampaikan menjadi hal yang fundamental agar pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, mawadahi keragaman, dan memperkuat kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai konstruksi pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Baker, B., & Heyning, K. (2004). *Dangerous Coagulations: The Uses of Foucault in the Study of Education*. New York: Peter Lang.
- Ball S (ed.). (1990). *Foucault and Education: Disciplines and Knowledge*. London: Routledge.
- Ball, S. J. (2017). *Foucault as Educator*. London: Springer.
- Blades, D. (1997). *Procedures of Power and Curriculum Change: Foucault and the Quest for Possibilities in Science Education*. New York: Peter Lang.
- Bushnell, R. (1996). *A Culture of Teaching: Early Modern Humanism in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Cahyani, F. F. (2017). Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1).
- Deacon, R. (2000). *Theory as Practice: Foucault's Concept of Problematization*. *Telos*, 118:127-142.



- Deacon, R. (2002). *Truth, Power and Pedagogy: Michel Foucault and the Rise of the Disciplines. Educational Philosophy and Theory, 34:435-458.*
- Deacon, R. (2005). *Moral Orthopedics: A Foucauldian Account of Schooling as Discipline. Telos, 130:84-102.*
- Deacon, R. (2006). *From Confinement to Attachment: Foucault on the Rise of the School. The European Legacy (in press).*
- Foucault, M. (1988). *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Trans. Richard Howard. New York: Vintage Books.*
- Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas. Terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.*
- Foucault, M. (2002). *Archaeology of Knowledge. Trans. Sheridan Smith. London and New York: Routledge.*
- Foucault, M. (2005). *Order of Things: The Archaeology of the Human Sciences. Trans. Tavistok/Routledge. London and New York: Routledge.*
- Gutting, G. (2005). *Foucault: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.*
- Ilham, F. M. (2020). Relasi Kuasa Guru dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Paradigma Universitas Negeri Surabaya, 9(2).*
- Jardine, G. M. (2005). *Foucault and Education. New York: Peter Lang Publishing, Inc.*
- Olssen, M. (1999). *Michel Foucault: Materialism and Education. London: Bergin and Garvey.*
- Siswadi, G. A. (2023a). Konsep Kebebasan dalam Pendidikan Perspektif Rabindranath Tagore dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(02), 97-108, 2(02), 97-108.*
- Siswadi, G. A. (2023b). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar. Badung: Nilacakra.*
- Tamboukou, M. (2003). *Women, Education and the Self: A Foucauldian Perspective. New York: Palgrave Macmillan.*
- Walshaw, M. (2007). *Working with Foucault in Education. Rotterdam: Sense Publisher.*